

Implementasi BTPKLW Rangga Dzul Karnain

by Veronica Sri Astuti

Submission date: 31-Jan-2023 04:09AM (UTC-0600)

Submission ID: 2003239615

File name: Implementasi_BTPKLW_Rangga_Dzulkarnain.docx (39.84K)

Word count: 3532

Character count: 23466

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN TUNAI PEDAGANG KAKI LIMA DAN WARUNG (BTPKLW) KOTA PROBOLINGGO DI MASA PANDEMI COVID-19

Veronica Sri Astuti, Nourma Ulva Kumala Devi, Rangga Dzulkarnain

Universitas Panca Marga Kota Probolinggo

Email : dzulkarr@gmail.com

Abstract

Situasi di Indonesia semakin parah akibat wabah Covid-19. Ekonomi yang pernah berkembang pesat mengalami penurunan tajam, dan tingkat kematian meningkat. Roda kehidupan manusia seringkali terhenti karena mobilitas masyarakat yang terbatas, terutama bagi pedagang kaki lima yang bekerja dalam peran yang membutuhkan mereka untuk mempertemukan konsumen dan penjual dalam rangka berbisnis. Pedagang kaki lima kehilangan pendapatan sebagai konsekuensi dari undang-undang pemerintah yang memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk menurunkan tingkat kematian akibat Covid-19. Presiden memberikan perintah langsung kepada Mabes Polri untuk memberikan bantuan secara eksklusif kepada pedagang kaki lima dan warung karena menyadari dampak ekonomi yang semakin berkurang dan merugikan para pedagang. Polres Probolinggo Kota mengawal Program Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung yang bertujuan untuk memberikan nominal sebesar 1,2 juta kepada warung dan pedagang kaki lima. Dengan menggunakan teori Van Horn dan Meter dalam 6 indikator. Peneliti ingin memastikan apakah BTPKLW ini telah dilaksanakan dengan benar dengan melihat: 1) Standar Kebijakan, 2) Sumber Daya, 3) Karakter Organisasi, 4) Komunikasi, 5) Sikap Pelaksana, dan 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.

1. PENDAHULUAN

Kehancuran dunia disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang berasal dari Wuhan, Hubei, Republik Rakyat Tiongkok, pada tahun 2019. Pandemi, atau wabah beberapa penyakit menular, menghadirkan masalah ekonomi, sosial, dan politik yang kompleks di wilayah geografis yang luas. Ini berpotensi menyebabkan morbiditas dan kematian secara global dan menyebar dengan cepat. global, terdapat 197 juta infeksi COVID-19 per 30 Juli 2021, dengan 3,3 juta di antaranya terjadi di Indonesia. Semua aspek kehidupan manusia telah terkena dampak buruk dari bencana pandemi. (WHO, 2021).

Pemerintah Indonesia menganjurkan pembatasan kegiatan ekstrakurikuler serta dimulainya pekerjaan rumah, belajar, dan bahkan agama. Ada beberapa inisiatif dan proyek yang telah diselesaikan pemerintah. Penegakan PPKM dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) harus didahulukan, diikuti dengan pengamanatan atau penguncian ruangan (Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Tidak diragukan lagi, hal ini berdampak besar pada semua tingkat anggaran publik. Akibat penurunan penjualan, karyawan diberhentikan dari berbagai perusahaan, perjanjian kerja tidak diperpanjang, dan beberapa dealer bangkrut atau gulung tikar. Ini adalah hasil utama dari strategi eksklusi sosial, yang mengarah pada pengembangan kelas baru, rumah tangga miskin dengan beberapa anggota. (Ihsanuddin, 2020).

Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional dan bencana non alam (detikcom/d.n.d.). Pembuatan vaksin merupakan upaya lain yang dilakukan untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Selain membantu masyarakat bertahan dari penyakit, vaksinasi juga akan meningkatkan nilai ekonomi dan menjadi komoditas yang banyak dicari. Oleh karena itu beberapa negara berlomba-lomba untuk dapat membuatnya. Tindakan cepat diperlukan untuk obat lain yang efektif, seperti program vaksinasi, selain mematuhi norma kesehatan.

Pemerintah memberikan program dukungan kepada individu yang mengalami masalah ekonomi selain memerangi epideminya melalui kampanye imunisasi. Sesuai Peraturan Gubernur Jatim Nomor 22 Tahun 2020, yang menetapkan standar pemberian bantuan kepada Provinsi Jatim dalam penanggulangan dampak penyakit virus corona tahun 2019, (Covid-19). Bantuan Finansial dijelaskan dalam Bab IV Ayat 3 sebagai berikut: (1) Bantuan finansial diberikan kepada penerima bantuan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf B. (2) Ada beberapa cara untuk memberikan bantuan tunai kepada penerima manfaat, baik bantuan langsung tunai tambahan, bantuan nontunai, dan/atau bantuan serah terima (BFNT) (Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019). (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur, 2020).

Sesuai SK Kapolres 1414, salah satu program bantuan penanganan Covid-19 di Kota Probolinggo adalah Bantuan Tunai Pedagang dan Warung Kaki Lima (BTPKLW) sebesar Rp. 1,2 juta, diperuntukkan bagi tiga ribu lima ratus penerima manfaat, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pemilik usaha di PPKM Tingkat 4 kabupaten/kota yang belum pernah mendapatkan Bantuan Presiden (BPUM) untuk Usaha Mikro Produktif. Dengan pendampingan aplikasi dan kegiatan berbasis lapangan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, TNI dan POLRI menyebarluaskan dan mendata BTPKLW. Fase 3 program BPUM telah diselesaikan sebelum peluncuran program ini. September 2021 menandai berakhirnya program bantuan BPUM. Ditegaskan, program bantuan BLT UMKM masih bisa dimanfaatkan masyarakat sampai bulan Desember pada 2021. Program bantuan BPUM/BLT UMKM itu, seperti diketahui, sudah terselesaikan atau pembayarannya dihentikan pada 30 September 2021. Penyelesaian penyaluran BLT BPUM atau UMKM Tahap 3 terkoneksi dengan penyaluran ini. (Aziz Manna Memorandum, 2021).

Pemerintah memberikan bantuan ini karena pelaksanaan PPKM memiliki pengaruh besar terhadap operasi komersial dan kegiatan ekonomi. Beberapa usaha terpaksa tutup akibat kondisi sulit tersebut. Pemerintah berpikir bahwa dengan memberikan bantuan ini, akan sangat bermanfaat bagi PKL dan kios yang kena dampak wabah parah untuk mendapatkan bantuan keuangan. Dengan memberikan dukungan finansial kepada pedagang kaki lima dan kios, pemerintah memberikan rasa aman kepada warganya yang berjuang secara finansial akibat pandemi.

Kota Probolinggo menasar 3.550 penerima BTPKLW dengan memberikan bantuan sebesar seratus dua puluh ribu rupiah. Durasi dukungan ini hingga akhir Oktober 2021.

Badan Keamanan dan Keamanan Nasional membantu Polres Probolinggo Kota dalam mendistribusikan barang ke lingkungan dan dalam melakukan survei dan pendataan di semua aspek otoritas desa dan di sekitar outlet penjualan kota. Kriteria Permohonan Warung dan Pedagang Kaki Lima (BTPKLW) meliputi

Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan, Anda harus memberikan bukti pendukung seperti KTP, bukti kepemilikan usaha, dan rencana pembentukan usaha.

Program yang dipakai Polres untuk melacak dan men-survei penerima bantuan ini terkait

langsung dengan KemenKop dan Sosial yang bertugas memilih data yang didapat oleh Babinkamtibnas. Pelaku usaha yang mendapat dukungan setelah validasi akan mendapat surat undangan dari Babinkamtibnas.

Mereka yang telah diundang akan dibawa ke Polres Probolinggo, di mana akan diberikan Bantuan Uang Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung, yang menggagas BTPKLW dibubarkan Polres Probolinggo sejak September tahun lalu. Dengan target 3.500 penerima, bantuan ini dibagikan secara bergiliran selama dua bulan, mulai September hingga Oktober.

Karena perilaku organisasi, sumber daya manusia, dan kemampuan untuk membuat jaringan sosial yang relevan sangat penting untuk keberhasilan program, peneliti dalam studi ini berkonsentrasi pada proses implementasi dan solusi yang dihasilkan dari pelaksanaan program bantuan sosial tersebut. Istilah tersebut peneliti gunakan untuk penelitian ini sebagai konsekuensi dari pelaksanaan program Bantuan Sosial Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) di Kota Probolinggo di masa Pandemi Covid-19.

2. METODOLOGI

Teknik penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dipakai dalam penelitian ini. Teknik penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metodologi penelitian kualitatif yang berpijak pada aliran pemikiran postpositivis disebut sebagai pendekatan baru, menurut Sugiyono (2015:14). Karena proses penelitiannya lebih artistik (kurang berpola), maka teknik ini disebut juga dengan metode artistik. Disebut juga metode interpretatif karena data penelitian lebih dipusatkan pada interpretasi data yang diperoleh di lapangan. Karena kemampuannya untuk mengumpulkan materi yang tersebar dan kemudian menyusunnya menjadi topik yang koheren dan mudah dipahami, teknik kualitatif juga sering disebut sebagai metode konstruktif. (Sugiyono, 2013).

Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini dipilih karena data dari penelitian ini mengkaji fenomena, fakta, dan peristiwa yang terjadi di lapangan serta dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Dengan pendekatan kualitatif, penulis dapat mendalami data untuk mengungkap detail yang belum terungkap sebelumnya.

3. HASIL DAN DISKUSI

Gagasan Van Meter dan Van Horn, disajikan dalam (A Model of the Policy Implementation Process), Menurut Van Horn dan Meter (1975), ada enam aspek yang mungkin mempengaruhi seberapa baik tujuan dan standar eksplisit diterapkan: sumber daya, ikatan antar organisasi yang pekerjaan, fitur kelembagaan, dan sebagainya. Implementasi organisasi, konteks politik, sosial, dan ekonomi, serta disposisi merupakan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Ke enam elemen ini memiliki efek sebagai berikut pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan:

a. Standar dan Tujuan

Salah satu faktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn adalah adanya tujuan dan kriteria yang ditetapkan. Dia berpendapat bahwa maksud di balik pembuatan kebijakan berfungsi sebagai ukuran efektivitasnya, dan bahwa tujuan kebijakan saat ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu kebijakan dijalankan. Suatu kebijakan dianggap berfungsi dengan baik jika tujuannya sesuai. (Anggara 2014, kebijakan publik)

Peneliti mengevaluasi berbagai komponen kebijakan, termasuk tujuan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Kios (BTPKLW) yang disebutkan dalam Kep/1414/X/2021 tentang bantuan tunai, berdasarkan metrik umum dan tujuan program. mekanisme. bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung Resor Polri yang memberikan bantuan atas perintah langsung Presiden bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian Sosial melalui Polres sebagai penyalur kebijakan, yang mengikuti kebijakan BPUM, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), program Keluarga Harapan (PKH), dan berbagai program pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di daerah tertular PPKM level 4 perkotaan. Bantuan dari BTPKLW ini khusus diberikan kepada warga di Kota Probolinggo dan yang memiliki usaha keliling seperti kios dan gerobak. Selain itu, jika Anda belum pernah mendapatkan bantuan pemerintah sebelumnya, Anda memiliki dokumentasi bisnis, dan Anda ingin memberikan gambaran tentang perusahaan Anda.

b. Sumber Daya

Kapasitas untuk menggunakan sumber daya yang paling krusial dalam menilai kinerja proses implementasi sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah proses implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan pada titik-titik tertentu dari keseluruhan proses implementasi untuk menyelesaikan tugas yang diamanatkan oleh kebijakan yang dirumuskan secara apolitis. Namun, sangat sulit untuk mengantisipasi kinerja kebijakan publik ketika kompetensi dan kemampuan sumber daya ini tidak ada.

Menurut teori Van Horn dan Van Meter, tiga komponen Kesimpulan kajian tersebut dinilai dapat membantu pelaksanaan Program Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW). Komponen sumber daya manusia didahulukan, kemudian komponen sumber daya keuangan dan akhirnya komponen sumber daya waktu. Ada dua tanggung jawab ketika Program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung diluncurkan. yang berperan sebagai sumber daya manusia (BTPKLW). Kedua tanggung jawab tersebut adalah Babinkamtibnas dalam hal mengumpulkan informasi tentang potensi bantuan klien. Kedua, anggota Bagian Keuangan (Sikeu) Polres Probolinggo Kota berfungsi sebagai ketua tim untuk pelaksanaan pendataan dan pendataan serta pelaksana penyaluran bantuan kepada calon penerima manfaat yang semuanya dilakukan di sana.

Diketahui dari lokasi studi bahwa sebagian besar penerima bantuan tunai adalah orang dewasa berusia 40-an tahun ke atas, serta memiliki kartu bukti usaha dan NPWP.

(NIB), KTP, serta PPKM tingkat 4 untuk daerah. Kartu anggota Ikatan Pedagang Kreatif Lapangan Kota Probolinggo dapat digunakan untuk bahan rujukan dalam mengajukan bantuan ini, khususnya bagi pedagang yang tidak sesuai kualifikasi untuk menjadi calon penerima manfaat.

Salah satunya adalah anggota Asosiasi Pedagang Kreatif Lapangan Kota Probolinggo, yang juga memberikan dokumentasi keanggotaan mereka sebagai anggota Asosiasi dan dapat dianggap untuk persyaratan untuk mendapatkan bantuan. Karena beberapa pedagang ini sangat asing dan sulit untuk mempersiapkan kebutuhan bantuan, terutama untuk orang tua, paguyuban ini juga membantu pedagang yang bukan anggota dengan menyiapkan surat dan persyaratan untuk calon penerima manfaat.

Aops Kapolri, seorang pengawas dan asisten pimpinan di Mabes Polri yang melapor langsung ke Kapolri, memberikan uang bantuan itu secara pribadi. Bidang Keuangan kemudian mengarahkannya ke Polda yang ditugaskan di Polres, tempat penyaluran bantuan.

Tidak ada pendanaan yang dialokasikan oleh pemerintah dalam prosedur komponen anggaran dana operasional Penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW). Polres masing-masing bertugas mendukung tanggungan dalam menjalankan acara hingga prosedur distribusi didanai. Hibah pemerintah adalah satu-satunya uang yang disediakan untuk BTPKLW.

Mengenai waktunya, Polres Probolinggo Kota telah mencapai target penyaluran pertolongan pertama tahun Instruksi kepada Polri dari Mabes Polri dalam menyikapi tahun 2021 tentang Program Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima dan Kios (BTPKLW) yang dimulai pada 6 September telah diterima. Dengan bantuan Babinkamtibnas dan Bagian Keuangan (Sikeu) Polres Probolinggo, Kota Probolinggo melaksanakan penyaluran bantuan tunai kepada pedagang kaki lima dan Warung (BTPKLW) dengan memberikan bantuan kepada penerima bantuan sebanyak 3.500 orang masing-masing senilai satu juta dua ratus ribu rupiah—masing-masing satu juta dua ratus ribu rupiah antara tanggal 21 September dan 30 Oktober. Sebanyak 13 paket untuk Penyaluran karena kekurangan tenaga kerja

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Ketika menganalisis ciri-ciri lembaga pelaksana, topik ini tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi, sebagaimana dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Struktur birokrasi adalah sifat, praktik, dan mode komunikasi yang secara teratur terwujud dalam badan eksekutif dan memiliki hubungan potensial dan nyata dengan dampak badan tersebut terhadap implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) melihat berbagai variabel yang dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan menjalankan kebijakannya, antara lain: 1) Jumlah dan ukuran pegawai instansi; 2) Seberapa besar kontrol hierarki yang dimiliki lembaga pelaksana atas pilihan dan praktik di tingkat sub-unit; dan 3) Sumber pembiayaan politik organisasi (misalnya dukungan dari anggota legislatif dan eksekutif) 4) Vitalitas organisasi; 5) Efektivitas komunikasi

Jaringan komunikasi horizontal dan vertikal yang bebas dan tingkat kebebasan komunikasi yang cukup besar dengan individu di luar adalah karakteristik dari sistem "terbuka" perusahaan; 6) Hubungan formal dan tidak resmi lembaga dengan entitas "pengambil keputusan" atau "pelaksana keputusan".

Mabes Polri telah menjamin dan mempercayakan kepada Polres Probolinggo Kota untuk diberikan kepada Bagian Keuangan (Sikeu) Dalam rangka pelaksanaan program, dalam penyaluran serta operator dalam penilaian dana di lokasi penyaluran Bantuan Tunai PKL dan Warung (BTPKLW). Kemudian ada Babinkamtibnas, tim

survei yang digunakan untuk mengumpulkan data pertama di lingkungan calon penerima bantuan. Karena kegiatan Babinkamtibnas tersebar luas di seluruh kota dan sekitarnya, kabar kehadiran mereka dapat menyebar ke setiap lapisan masyarakat.

Bersama Kasatbinmas yang ahli di bidang ilmu sosial, Kapolres dan Wakapolres mengawal penyaluran bantuan sebagai petinggi Polres agar masyarakat mudah memahami alur dan prosedur mendapatkan bantuan di Polres Probolinggo Kota.

Meski tidak ada sumber bantuan lain, Polres Probolinggo telah berupaya semaksimal mungkin untuk membantu warga Kota Probolinggo dengan memanfaatkan peran anggotanya saat ini. Secara khusus, fungsi Babinkamtibnas memainkan peran penting dalam penyampaian informasi dan pengumpulan data. Sedangkan Babinkamtibnas secara pribadi melibatkan masyarakat untuk mendata dan membagikan undangan resmi kepada calon penerima dari stan dan pedagang kaki lima.

d. Komunikasi

Langkah-langkah Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan sukses, individu yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya harus memahami tujuan dan sasaran. Pengukuran dan tujuan mendasar dari kebijakan, serta keakuratan komunikasinya dengan pelaksana dan konsistensi atau keseragaman pesan ke berbagai sumber informasi, semuanya harus dipertimbangkan dengan hati-hati..

Van Meter dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa kemungkinan implementasi yang berhasil tergantung pada ketepatan dan konsistensi dengan mana metrik dan tujuan dikomunikasikan, serta kejelasan yang diartikulasikan. Anggapan bahwa kesalahan akan sangat jarang terjadi semakin kuat dengan semakin baiknya koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Sebaliknya juga.

Dalam hubungan antar organisasi dan antar pemerintah, dua jenis kegiatan implementasi adalah yang paling krusial. Pertama, bimbingan dan dukungan teknis yang mungkin ditawarkan. Kedua, berbagai sanksi—baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan—dapat digunakan oleh otoritas. Perkembangan kebijakan Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) yang berdasarkan perintah Presiden dipercayakan langsung kepada Kepolisian Resor (Polres) sebagai unit pelaksana kebijakan berkerjasama dengan Kementerian Koperasi diketahui dalam pelaksanaan Program Bantuan Tunai Bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) di Polres Probolinggo Kota Probolinggo.

Selama prosedur distribusi masyarakat. Ditjen Polri mengembangkan aplikasi yang digunakan Polres untuk melacak dan mendistribusikan calon pengguna bantuan dana pedagang kaki lima dan warung (BTPKLW), yaitu Psikeu Presisi. Masyarakat umum tidak dapat menggunakan program ini; itu hanya tersedia untuk polisi. Aplikasi ini digunakan untuk melacak calon penerima bantuan keuangan dari bhabinkamtibnas yang aktif bergerak dalam pengolahan data. Dalam hal ini, penerimaan bantuan dari BTPKLW bergantung pada masyarakat yang tidak menerima bantuan dari pemerintahan sebelumnya. kemudian memberikan bukti bisnis. Sertakan informasi pribadi seperti KTP, jenis usaha, lokasi rumah, wilayah yang terkena PPKM Tingkat 4, dan bukti surat keterangan usaha. Kementerian Koperasi dan Kementerian Koperasi yang bertugas memindai data agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan, akan segera terhubung melalui aplikasi Psikeu tepat yang akan digunakan untuk mengirimkan data yang diterima dari khalayak ramai.

Menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Kementerian Sosial untuk memverifikasi informasi tersebut karena diduga ada beberapa orang yang sebelumnya telah menerima bantuan. Kapolri yang bersangkutan akan menerima perintah setelah data diverifikasi atau dikonfirmasi oleh Kementerian Koperasi dan Sosial, selanjutnya Babinkamtibnas akan mengirimkan surat undangan kepada calon penerima yang telah diverifikasi oleh Kementerian Koperasi dan Sosial melalui Aplikasi Presisi Psikeu. Informasi dari Paguyuban Pedagang Lapangan Kreatif Kota Probolinggo yang juga mendukung masyarakat sesama pedagang tentang banyaknya kebutuhan akan bantuan dana juga merambah ke masyarakat, khususnya di kalangan pedagang.

e. Sikap dan Kecenderungan Pelaksana

Setiap elemen model yang diuraikan sebelumnya, menurut Van Meter dan Van Horn (1975), harus disaring melalui perspektif para pelaksana di yurisdiksi tempat kebijakan dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga aspek dari reaksi pelaksana—kognisi (pemahaman) tentang kebijakan, gaya respon (penerimaan, netralitas, atau penolakan), dan intensitas respon yang bisa mempengaruhi kapasitas dan motivasi mereka untuk mengimplementasikan kebijakan.

Faktor lain yang sangat krusial adalah arah kecenderungan pelaksana terhadap ukuran dan tujuan mendasar. Karena mereka tidak setuju dengan tujuan yang digariskan dalam peraturan ini, pelaksana mungkin gagal menjalankan kebijakan ini dengan tepat. Juga sebaliknya.

Polres Probolinggo Kota, sebagai pelaksana kebijakan, mempraktekkan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW).

Ketahui bahwa pemerintah membuat kebijakan ini dengan tujuan tertentu: untuk memberikan dukungan moneter kepada pedagang kaki lima dan pemilik warung yang terkena dampak Covid-19 dan masuk ke wilayah PPKM tingkat 4. Dan Polres Probolinggo Kota yang merupakan pihak pelaksana, melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Polres Probolinggo Kota terkendala dengan aspek teknologi dari program tersebut dalam proses pemberian Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW). Jika banyak user atau pengguna yang menggunakan aplikasi yang terhubung dengan Kementerian Sosial dan Koperasi, hal ini sering mengakibatkan server downtime untuk aplikasi yang digunakan. Akibatnya, agak menghambat pengumpulan data dan penilaian selama distribusi.

f. Lingkungan Sosial dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), sejauh mana lingkungan eksternal memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kebijakan publik berlaku sebagai proxy keberhasilan implementasi publik. Kemungkinan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung pelaksanaan kebijakan yang sehat. Akibatnya, upaya untuk mewujudkan rencana juga harus mempertimbangkan lingkungan eksternal yang menguntungkan.

Program Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosial, politik, dan ekonomi lingkungan (BTPKLW). Diketahui dari faktor lingkungan sosial terdeteksi adanya dampak yang berpengaruh dari pengaruh yang terjalin dari lingkungan Polres Probolinggo Kota dan

masyarakat penerima manfaat berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan di lokasi pelaksanaan program, Polres Probolinggo Kota. Menurut penilaian pihak kepolisian terhadap masyarakat penerima bantuan, mereka sangat terbantu dan diharapkan mendapat tanggapan positif dari program ini serta masyarakat sekitar yang melihat dampak dari bantuan tersebut dan ikut serta dalam penyaluran bantuan yang mereka dapatkan. Keterlibatan Polri sebagai pemberi dukungan dana kepada pedagang kaki lima dan stan dipandang baik oleh penduduk, dan hal ini menimbulkan reaksi yang baik.

Program Bantuan Tunai bagi PKL dan Prosedur Pembagian Warung tidak mendapat dukungan dari lembaga lain, menurut Polres dalam menanggapi komponen politik (BTPKLW). Terdapat dua loket (BTPKLW), satu dari Polres Probolinggo Kota dan satu lagi dari Kodim Kota Probolinggo, untuk mencegah duplikasi data atau multiple entry saat pendataan masyarakat.

Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) merupakan program yang sangat membantu perekonomian masyarakat dengan menawarkan alternatif dari kondisi ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk. Diharapkan program ini dapat mengurangi beban masyarakat pada umumnya dan para Pedagang Kaki Lima dan Warung pada khususnya, dan reaksi lingkungan terhadap bantuan ini sangat positif. Mereka menggunakan bantuan ini untuk perusahaan mereka, seperti membeli perlengkapan untuk Sumber pendapatan utama mereka berasal dari toko, dan sisa makanan digunakan untuk memberi makan keluarga mereka.

4. KESIMPULAN

Dari kerangka isu, temuan kajian, dan perdebatan, terlihat bahwa Program Bantuan Uang Pedagang dan Pelantikan Jalan (BTPKLW) dilaksanakan sebagai berikut: Asalkan mereka memiliki bukti dagang, Program Bantuan Tunai Untuk Pedagang Jalan dan Warung (BTPKLW) di Kota Probolinggo mungkin merupakan bantuan yang tidak biasa diberikan khusus untuk pedagang kaki lima dan pemilik warung dengan bantuan minimal 1,2 juta rupiah. Berdasarkan kriteria dan tujuan, hal ini dimungkinkan. Berdasarkan Kep/1414/X/2021 tentang Alat Bantu Pedagang Jalan dan Warung, Daerah Tingkat 4 Penggunaan Pembatasan Latihan Masyarakat (PPKM) adalah yang mendapat dukungan.

Sumber Daya Pelaksana yang meliputi anggota Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan Kota Probolinggo sebagai penerima manfaat serta Bagian Keuangan Polres Probolinggo sebagai penyalur bantuan dan Babinkamtibnas sebagai surveyor lokasi, serta komponen bantuan lainnya, untuk sumber pendapatan potensial—merupakan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima.

Anggota Bagian Keuangan (Sikeu), yang ditugaskan Mabes Polri sebagai tim penyalur bantuan di lingkungan Polres tempat penyaluran bantuan, mengumpulkan data masyarakat bermitra dengan Babinkamtibnas untuk membantu membentuk fitur Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW).

Penulisan terkait dengan dimulainya Program Bantuan Tunai Bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW). Mabes Polri yang berada langsung di bawah Presiden memberikan instruksi awal kepada Polri sebelum Polri mengeluarkan Surat Perintah Kep/1414/X/2021 tentang tata cara pemberian bantuan tunai kepada pedagang kaki lima dan warung. Dalam surat kepada Polres Probolinggo Kota, Babinkamtibnas diperintahkan untuk menyalurkan bantuan tunai yang dilakukan oleh Departemen Keuangan yang bertindak

sebagai penyalur. Setelah menyebarkan informasi ke RT/RW dan mensurvei lokasi calon penerima, yang juga dibantu sosialisasinya oleh Paguyuban Pedagang Kreatif Kota Probolinggo. Mengikuti pedoman yang tertuang dalam Kep/1414/X/2021 tentang Mekanisme Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung, informasi ini dikirimkan ke Kementerian Koperasi dan Sosial untuk diverifikasi apakah orang tersebut memerlukan bantuan atau tidak.

Program Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) yang berupaya membantu perekonomian masyarakat setempat, khususnya yang bergerak di bidang perdagangan yang operasionalnya mulai terpuruk akibat dampak COVID 19 dan PPKM level 4, memiliki sikap mendukung dan komitmen dari Pelaksana dari Polres Probolinggo Kota sebagai pelaksana. Jelas dari sikap pelaksana bahwa mereka memiliki lebih sedikit sumber daya dan batasan kesalahan aplikasi. Setelah itu, lakukan penyesuaian dengan memperkenalkan sistem gelombang agar lebih mudah bagi mereka yang belum pernah mendapat bantuan.

Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) yang diluncurkan Polres Probolinggo Kota didukung oleh lingkungan politik, sosial, dan ekonomi. Komponen masyarakat dan pelaksana memiliki sinergi yang baik. Polres telah mendistribusikan dengan bersih saat sosialisasi di lokasi distribusi, dan penerima bantuan juga merasa nyaman dengan kinerja Polres.

Implementasi BTPKLW Rangka Dzulkarnain

ORIGINALITY REPORT

2 % SIMILARITY INDEX	25% INTERNET SOURCES	7% PUBLICATIONS	3% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	stietrisnanegara.ac.id Internet Source	20%
2	kaltim.tribunnews.com Internet Source	1%
3	ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id Internet Source	1%
4	makassar.terkini.id Internet Source	1%
5	triyani.wordpress.com Internet Source	<1%
6	www.harianhaluan.com Internet Source	<1%
7	surabaya.tribunnews.com Internet Source	<1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
9	kanalindonesia.com Internet Source	<1%

10

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1%

11

Engkus Engkus, Nanang Suparman, Fadjar Trisakti, Mohammad Robby Rodhiya.

"IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG", Jurnal

Governansi, 2019

<1%

12

Publication

<1%

repositori.usu.ac.id

13

Internet Source

<1%

14

www.rmolbanten.com

Internet Source

<1%

Komir Bastaman. "Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang", The World

15

of Public Administration Journal, 2020

Publication

<1%

arsipjdih.jatimprov.go.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On